

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Sebagai acuan dari apa yang ingin coba penulis teliti dan analisis dalam pembahasan penulis nantinya, terdapat pula sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan nantinya mampu mendukung dan menjadi gambaran penulis dalam melakukan penelitian, serta mampunya juga sebagai bahan rujukan dan referensi. Adapun kajian terdahulu yang berupa skripsi maupun jurnal tersebut:

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
Soraya, Sarah (2020)	OPOSISI DAN PARTAI POLITIK Analisis terhadap Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera di Luar Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024	Dalam penelitian skripsi yang dituliskan oleh mba Soraya, terkait dengan Oposisi yang dalam hal ini berfokus pada Partai Keadilan Sejahtera ini, penulis menemukan penemuan tentang bagaimana konsistensi oposisi yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera pada dua kali kontestasi

		<p>pemilu yaitu pada 2014 dan 2019. Selain itu dalam penelitian kali ini juga membahas terkait dengan pola partai politik, dan <i>check and balances</i>. Keunikan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus kepada peran oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara yang menjadi pembeda dalam penelitian yang akan coba penulis tuliskan ialah bagaimana penulis akan membahas dan menganalisis terkait dengan peran partai koalisi yang melakukan hegemoni kekuasaan pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin</p>
Akbar, Chandra (2014)	KEKUATAN POLITIK LOKAL DALAM	Dalam penelitian ini, penulis menemukan

	<p>PEMENANGAN SYAHRUL YASIN LIMPO (SYL) PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2013 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN GOWA</p>	<p>beberapa hal dari hasil penelitian Skripsi yang diteliti dan dituliskan oleh mas Akbar, seperti salah satunya dalam skripsi ini penulis lebih banyak menyinggung tentang kekuatan politik yang dimiliki oleh Syahrul Yasin Limpo sebagai calon incumbent dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Kekuatan politik yang di-<i>highlight</i>, lebih kepada partai Golkar yang sangat kuat di Sulawesi dan partai koalisi lainnya. Keunikan dalam penulisan ini adalah skripsi ini membahas dengan detail terkait dengan pola koalisi yang berada pada lingkungan daerah, skripsi ini juga</p>
--	--	---

		<p>membahas terkait dengan aktor politik, sementara perbedaan yang dimiliki dengan apa yang akan penulis teliti adalah antara penulis dan skripsi ini sama-sama membahas terkait dengan kekuatan politik yang membedakan adalah locus dari penelitian tersebut jika penulis membahas dalam lingkup nasional, skripsi ini lebih mengarah kepada tingkatan lokal.</p>
<p>Sholihin, Ahmad, Kurnia, Heri (2022)</p>	<p>FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN</p> <p><i>JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN Vol. 6 No. 2 – Mei 2022.</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kondisi partai politik koalisi pada pemerintahan yang sedang berlangsung. Selain itu penelitian kali ini juga membahas terkait fungsi, peran dan ciri dari bagaimana koalisi bekerja</p>

		dalam suatu pemerintahan.
Siboy, Ahmad., (2021).	Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia <i>Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISop) Vol. 3 No.1 Mar 2021</i>	Penelitian ini berupaya membahas dan menemukan sebuah opsi alternatif baru bagi pola koalisi partai politik Indonesia, hal ini timbul karena keresahan dengan adanya koalisi seperti saat ini rentan terjadi politik pecah belah. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menemukan sebuah alternatif yaitu pola koalisi permanen yang didasarkan kepada corak dan ideologi masing-masing partai.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Grand Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Egemonia yang merupakan bahasa Yunani dari hegemoni berarti penguasaan sebuah bangsa dengan bangsa lainnya. Sementara itu menurut Gramsci adalah sebuah konsensus dimana ketertundukan diperoleh dari

persebaran ideologi-ideologi melalui ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Karena hegemoni bukanlah sekedar hubungan dominasi dengan kekuasaan. Namun, hubungan yang terbangun dengan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni juga merupakan kemenangan kelas yang berkuasa atas berbagai macam kekuatan politik yang ada melalui mekanisme konsensus.⁶

Konsep sederhana yang keluar dan dicetuskan oleh Gramsci soal hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggota serta kadernya menjalankan kekuasaannya melalui kelas-kelas yang ada di bawah dengan cara kekerasan dan persuasi. Namun, Gramsci kerap kali juga berbicara terkait dengan konsensus yang kerap kali ia menyebutnya sebagai bagian dari Hegemoni itu sendiri, membahas terkait dengan konsensus dalam hal ini Gramsci mengaitkannya dengan suatu spontanitas yang bersifat psikologis. Karena, konsensus sejatinya dapat terjadi jika melalui beberapa faktor; a) karena terbiasa dengan mengikuti tujuan-tujuan dengan cara tertentu, b) adanya rasa takut akan konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri, dan c) terakhir konsensus dapat terjadi karena adanya kesadaran maupun persetujuan terhadap unsur tertentu. Sementara itu Gramsci memiliki pandangan lain soal konsensus yaitu konsensus dapat saja tercipta karena ada dasar persetujuan.

Konsensus yang nantinya menurut Gramsci akan sangat terimplikasi dengan Hegemoni. Merupakan sebuah konstruk penting yang ada di dalam

⁶ Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

tatanan masyarakat secara integral. Gramsci, kemudian menyebutkan terdapat dua hal sebagai penyebab kurangnya basis konseptual yang dimiliki proletariat atau masyarakat kelas pekerja, yaitu pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Mekanisme kelembagaan secara garis besar meliputi; rumah ibadah, sekolah, partai politik, dan media massa. Dalam hal pendidikan misalnya, Gramsci menyebutkan bahwa pendidikan yang ada tidak mampu untuk membangkitkan tingkat intelektualitas sehingga hal ini tidak dapat men-*upgrade* kemampuan kelas proletar untuk berfikir secara kritis dan sistematis. Pada sisi lain, mekanisme kelembagaan yang ada, seolah-olah dapat menjadi kaki tangan atau perpanjangan tangan kelompok yang sedang berkuasa untuk nantinya menentukan ideologi yang akan mendominasi. Dapat dikatakan konsensus yang dilakukan oleh masyarakat kapitalis merupakan sebuah kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*).

Berdasarkan realitas yang ada dan didasari atas analisis Gramsci terkait dengan Hegemoni. Selanjutnya, Gramsci menyebutkan terdapat tiga tingkatan dalam pembahasan terkait dengan Hegemoni, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni yang merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum.⁷ Penjelasan dari apa yang dimaksud dengan hegemoni integral atau hegemoni secara menyeluruh adalah ditandai dengan hadirnya beberapa afiliasi massa yang mendekati total. Dimana dalam eskalasi hegemoni yang satu ini terdapat konstruk nilai moral dan kecerdasan yang

⁷ Nezar Patria, Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara & Hegemoni*, Pustaka Pelajar. 1999.

kokoh, itu dapat tercipta dari hubungan organik pemerintah dan yang diperintah. Kemudian, hegemoni yang merosot dalam hegemoni ini ditandai dengan adanya potensi konflik dan disintegrasi yang timbul dibalik layar. Artinya meskipun sebuah sistem telah mencapai target dan kebutuhan, namun mentalitas massa perlu dipertanyakan karena menemukan ketidaksesuaian keselarasan dengan pemikiran hegemoni yang dominan. Terakhir merupakan jenis hegemoni minimum, dalam hegemoni minimum sandaran terhadap elit, politik, dan kaum intelektual, merupakan suatu hal yang hadir secara bersamaan keanggotaan adanya intervensi massa dalam hidup bernegara. Hal ini terjadi karena kaum Hegemonis tidak mau berkompromi dan mengakomodir kepentingan kelas yang lain dalam tatanan sosial di masyarakat.

Pembahasan mengenai Hegemoni dan Gramsci sebagai pencetus pun memiliki diskursus yang terukur dan luas. Salah satunya adalah teori hegemoni Gramsci pada dasarnya merupakan sebuah kritik yang secara diam-diam terhadap reduksionisme dan esensialisme yang kedua hal tersebut sangat melekat kepada mereka penganut marxis maupun pemikiran non-marxis, yakni merupakan sebuah proses yang secara tidak langsung mereduksi dan menganggap esensi atau nilai yang ada pada suatu identitas sebagai satu kebenaran yang mutlak.⁸

⁸ Nur Sayyid, S.K, *Materi Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)*, 2016, hal. 378.

Kemudian, pemikiran Gramsci yang orisinal dan menjadi *concern* adalah ketika membahas terkait dengan bagaimana peran kaum intelektual dalam tatanan sosial dan tahapannya menuju sosialisme. Dalam manuskrip yang ditulis oleh Gramsci dalam *Selections from Prison Notebooks*, pada saat dipenjara, setidaknya ada dua tema penting terkait pandangannya terkait dengan intelektual, yaitu:

- Tentang diperlukannya menghapus perbedaan yang kerap kali terjadi antara kerja manual dan kerja akademik yang dibalut dengan intelektualitas yang tinggi serta telah berlangsung lama di bawah bayang-bayang kapital, entah dalam proses produksi, ataupun dalam masyarakat politik dan masyarakat secara menyeluruh.
- Selanjutnya, berkaitan dengan hubungan antara sesuatu yang bersifat akademik dan kekuasaan, atau tentang legitimasi atau kekuasaan yang lahir dari monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa, dan dengan ini perlu terjadi keseimbangan dalam setiap perubahan yang ada dalam prosesnya menuju transisi masyarakat yang tanpa kelas atau sosialisme.⁹

Gramsci juga beranggapan bahwa seorang intelektual adalah setiap individu yang memiliki fungsi sebagai seorang organisatoris dalam lapisan dan tatanan sosial yang ada, dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat aktifitas produksi yang cukup padat, politik dan juga adanya hubungan

⁹ Endah Siswati, *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci*, Jurnal Translitera Edisi 5, 2017.

budaya. Oleh karenanya Gramsci menyatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual. Dalam konsep pemikirannya terdapat dua model intelektual menurut Gramsci, yaitu intelektual organik dan intelektual tradisional.¹⁰

Dalam model intelektual yang kerap kali dikatakan organik, menurut penulis ini merupakan hal yang menarik dari pemikir seperti Gramsci yang memiliki sebuah gagasan konseptual yang apik dan dikemas dengan penjelasan yang cukup komprehensif, menurut Gramsci Intelektual organik adalah intelektual yang juga merupakan fungsionaris dari organisator politik, yang kerap kali menyadari identitas yang diwakilkan dan yang mewakilkan, dan merupakan barisan terdepan yang nyata dan hadir atas keinginan lapisan kelas ekonomi atas. Fungsi yang diimplementasikan oleh intelektual organik kelas pemodal adalah bertindak sebagai agen kelas untuk mengorganisir hegemoni dalam masyarakat sipil dan mendominasi melalui aparat negara. Dengan demikian, menurut Gramsci para teknokrat dan seluruh pekerja di lapangan yang terkemuka adalah intelektual organik dalam bidang produksi. Sementara, politisi, penulis, akademisi, pers yang terkenal dan mempunyai pengaruh yang luas adalah intelektual organik dalam masyarakat sipil. Sedangkan, pegawai negeri, tentara, jaksa dan hakim di sebuah Pengadilan, adalah intelektual organik yang terdapat dalam sebuah negara.

¹⁰ Ibid, hal. 25.

2.2.1.1. Konsep Hegemoni Kekuasaan

Dalam konsep kekuasaan yang juga dipopulerkan oleh Antonio Gramsci penulis yang dalam hal ini melihat adanya relevansi antara teori maupun konsep dari Gramsci yang akan coba penulis implikasikan dengan analisis penulis nantinya yang membahas seputar hegemoni kekuasaan dalam lingkup pemerintahan. Ini merupakan sebuah konsep yang segar untuk menjadi pisau analisis penulis nantinya dalam proses pembuatan penelitian.

Konsep hegemoni Gramsci ini diambil secara dialektis dan diskursus melalui perdebatan yang kental dengan karakteristik pemikiran Italia, yakni dari Machiavelli (*force*), Pareto (*Consent*), serta Lenin (*Strategy*). Hegemoni dalam hal ini kerap kali fokus pada pengertian tentang keadaan sosial maupun keadaan politik yang menurut Gramsci disebut sebagai 'momen', dimana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan yang seimbang. Sementara itu, dominasi merupakan konsep dari keadaan yang sebenarnya yang menyebar dalam masyarakat melalui lembaga maupun individu dalam tatanan masyarakat, hal tersebut dapat berbentuk moralitas, adat, budaya, religi, prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari kalangan intelektual. Dalam hal ini Gramsci mencoba memperluas pengertian hegemoni sehingga tidak hanya menjelaskan hubungan yang terjadi antar kelas-kelas politik, akan tetapi hubungan sosial yang lebih luas.

Konsep hegemoni juga tidak selalu hanya berkaitan dengan dominasi politik, berupa kekuatan (*force*), tetapi juga dengan dominasi lewat budaya, termasuk dominasi bahasa. Di dalam sebuah sistem kekuasaan tidak hanya diperlukan 'kekuatan' (senjata, militer), tetapi diperlukan juga 'penerimaan publik' (*public consent*) yang diperoleh lewat mekanisme kepemimpinan yang berbudaya. Selain itu, konsep hegemoni kekuasaan, Gramsci kerap kali memberikan sebuah catatan penting yang dalam hal ini mencoba menganalisa mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Disini Gramsci membaginya pada tiga fase perkembangan kesadaran politik bersama dan organisasi. Dua fase pertama adalah fase ekonomi-korporasi, sedang yang ketiga adalah fase hegemonik. Fase ekonomi-korporasi lebih didasari oleh adanya tuntutan persamaan hak, kepentingan bersama semua kelas, akan tetapi masih dalam batasan ekonomi. Sedangkan fase ketiga adalah tahapan pertarungan ideologi yang ada hingga salah satunya, ataupun pertarungan ideologi tersebut dapat menjadi awal kemenangan yang bertujuan ekonomi, politik, moral, intelektual, sehingga perjuangan berlangsung pada situasi dunia secara luas, bukan lagi sekedar korporasi.¹¹ Hal yang demikian ini, pada akhirnya dapat menciptakan hegemoni kelompok sosial yang kuat atas kelompok lain yang ada dibawahnya. Bagi Gramsci, suatu kelas akan menjadi hegemoni jika mampu melewati fase korporasinya, dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kelas sosial lain dengan kepentingan sendiri, serta berhasil

¹¹ Nur Sayyid, K, S, Op.Cit., hal. 379.

menjadi representasi penuh dari kekuatan yang terdapat dalam sebuah lingkungan sosial yang ada.

Gramsci juga membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat politik: Keduanya berada disatu sisi, memiliki fungsi hegemoni yang dilakukan oleh kelompok yang terbanyak dalam masyarakat dan disisi lain juga mempunyai fungsi dominasi langsung yang dilakukan oleh negara dan pemerintah. Konsep hegemoni kekuasaan ini sangat relevan dengan pembahasan penulis dimana, dalam pembahasan penulis nantinya akan membahas terkait dengan partai koalisi yang berada para era Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dan melakukan sebuah hegemoni kekuasaan dengan menguasai beberapa sektor dalam sistem pemerintahan Indonesia, hal itu meliputi lembaga-lembaga negara. Gambaran singkat dari hasil analisis penulis adalah tidak adanya *check and balance* yang membuat jalannya pemerintahan menjadi kurang ter-*control* dan menjadi sebuah dominansi yang kuat dalam beberapa lembaga dan struktur ketatanegaraan bangsa Indonesia hari ini.

2.2.2. Teori Partai Politik

Partai politik adalah sebuah kelompok yang tersusun dengan anggota yang memiliki nilai, orientasi dan cita-cita yang sama.¹² Partai politik merupakan satu dari tiga pilar utama demokrasi yang penting dalam menunjang dinamika perpolitikan suatu bangsa. Istilah partai mengarah

¹² Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal 403-405

pada pengklasifikasian golongan yang ada di dalam masyarakat berlandaskan kesamaan suatu hal, seperti cita-cita, ideologi, keyakinan, hingga kepentingan. Pada perkembangannya, istilah partai cenderung digunakan bagi organisasi politik yang berada pada bidang politik. pengertian partai politik adalah suatu organisasi dari para tokoh politik yang berupaya menguasai kekuasaan pemerintah dan mengambil dukungan rakyat melalui persaingan antara satu golongan atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.¹³ Partai politik, merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sejalan demi memperoleh maupun mengendalikan kekuasaan di dalam pemerintahan. Para anggota yang menduduki jabatan penting di pemerintahan (kader), diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsi parpol sebagai perwakilan dari perkumpulan dalam pemerintahan (Suhawi, 2018). Partai politik sendiri ada dan kuat sekali kaitannya dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia ini. Keberadaannya di dalam negara demokrasi menjadi suatu variable yang utama sebagai pilar demokrasi.

Kemudian, karena sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial dan memungkinkan bagi partai politik untuk membentuk sebuah koalisi di parlemen untuk menjadi sebuah partai penguasa yang sah. Perpaduan yang terjadi antara sistem presidensial dan multipartai seperti di Indonesia ini jelas akan memiliki keterkaitan politik terhadap pola-pola

¹³ Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal 403-405

pembentukan koalisi politik. Dukungan partai-partai politik yang mayoritas yang memiliki basis dominan di pemerintahan dan parlemen juga merupakan suatu keniscayaan bagi sistem presidensial. Pengaruh koalisi politik yang terjadi akibat komposisi DPR yang diisi oleh kekuatan partai politik yang banyak inilah yang kemudian akan mempengaruhi kewenangan Presiden karena membutuhkan persetujuan oleh DPR.

2.2.2.1. Konsep Koalisi

Koalisi merupakan bentuk suatu kongsi atau kerjasama dengan satu atau lebih partai dan organisasi politik. Koalisi bersifat kerjasama dan tentu dengan sudut pandang yang simple dan ideal. Koalisi politik dapat tercipta secara utuh dan tidak bisa berubah tetapi dapat juga berubah sewaktu-waktu. Suatu koalisi bisa terbentuk secara sewaktu-waktu dengan beberapa persetujuan dan kesepakatan tertentu, sehingga setelah beberapa tujuan tercapai dengan sendirinya koalisi yang terbentuk akan hilang atau pecah. Saling bersaing untuk mendapatkan suara mayoritas agar bisa membentuk kabinet pada dasarnya adalah kerjasama antar partai politik koalisi sehingga menimbulkan hubungan bilateral atau multilateral. Hal ini bisa menjadi kepentingan politik dibalik layar. Salah satu permasalahan yang mendasar yang dialami oleh pemimpin negara ialah keadaan dikala partai politik yang berkuasa dan kebanyakan multi partai sehingga kepala Negara harus

melakukan lobi-lobi serta konsolidasi dengan partai-partai politik lain yang notabene butuh melaksanakan perpaduan kekuatan serta kekuasaan politik. Kekuatan dan kekuasaan politik pada kepala Negara berpengaruh pada pengaturan manajemen politik sebuah kepemimpinan karena lemahnya posisi pemimpin negara, filter terhadap kebijakan menjadi tersebar dikalangan beberapa koalisi partai politik sehingga tidak ada partai politik koalisi yang dapat menghambat kebijakan pemerintah (Nurfaizi, 2020).

Koalisi juga merupakan suatu proses pengambilan kebijakan dimana kinerja para perwakilan di kursi kabinet dalam menyusun strategi harus sesuai dengan program kerja. Capaian kinerja yang tinggi di dalam suatu pemerintahan negara dan jika dibarengi dengan realitas dilapangan yakni kerjasama politik dengan motivasi meluluhkan beberapa orang pendidri elite parpol untuk menjadi bagian duduk di kabinet sehingga anggota kabinet dikuasai oleh orang-orang yang kurang pandai dan kualitas yang berasal dari parpol yang mendapatkan jumlah perolehan suara yang besar dalam pemilu. Ketidaksetujuan terhadap kerjasama politik bisa membuat presiden beserta jajaran eksekutif akan lebih sibuk meneladani tantangan anggota dewan. Sehingga dari hal tersebut tugas eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan serta pembangunan pada masyarakat menjadi terbengkalai. Maka dari itu kepala negara yang berkuasa formal dan simbolik harus pandai agar

dapat mempengaruhi terjadinya pembentukan partai koalisi yang berhasil menjadi poros politik untuk mendukung jalannya suatu pemerintahan

Bentuk-bentuk koalisi yang terdapat di Indonesia pun bermacam-macam dikutip dari (Isnaini, 2020) Menyatakan ada

beberapa bentuk koalisi partai politik yang dikelompokkan menurut jenis koalisinya, yakni: 1) Koalisi potensial, ialah sesuatu kondisi koalisi ada relevansi yang timbul, dapat menjadi koalisi bila ada aksi bersama-sama. Koalisi ini dipecah lagi menjadi 2, yakni *Latent* artinya belum tercipta jadi koalisi aktif serta *Dormant* artinya tercipta tadinya, tetapi telah sudah tidak aktif lagi. 2) Koalisi operating, merupakan jenis koalisi partai politik yang masih berlangsung. Jenis ini dipecah menjadi 2, yakni koalisi stabil dimana koalisi ini cukup aktif, cenderung normal, serta terjadi dalam waktu yang singkat, serta koalisi temporer yang merupakan koalisi yang berfokus pada satu masalah inti. 3) Koalisi bersambung, merupakan jenis koalisi tentatif dikarenakan isu yang belum terselesaikan. Koalisi yang mana merupakan koalisi dalam ruang lingkup politik yang mana terdiri atas dua partai ataupun lebih guna membangun bersama-sama dalam satu kekuasaan.¹⁴

¹⁴ Ahmad Solihin, Heri Kurnia, *Fenomena Koalisi Partai Politik Pada Suatu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 2, Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, (2022), hal. 61.

Terdapat banyak cara sebuah parpol membuat koalisi atau aliansi. Koalisi kemudian dibedakan menjadi dua komponen utama yakni koalisi diplomatis dan koalisi startegis. Koalisi ini dibuat tidak bersumber pada dasar keharmonisan yang mana akan nampak dominasi kekuasaan didasarkan dengan parpol yang lebih besar.

Namun, hadirnya koalisi karena lebih ke faktor eratnya hubungan oligarki dikalangan elit politik, sehingga melupakan aspirasi dan amanah dari rakyat itu sendiri. Maka dengan hal yang demikian belum bisa berharap banyak dengan sistem koalisi taktis ini dikarenakan model seperti ini dirasa belum dapat memuaskan aspirasi yang selama ini diamanahkan.

2.2.3. Teori Oligarki

Fondasi selanjutnya dalam melakukan analisis mendalam terhadap kasus yang akan coba penulis teliti adalah dengan mengetahui tentang bagaimana oligarki bekerja, dan berikut adalah penjelasan terkait dengan teori oligarki yang sebagaimana telah dikemukakan oleh Jeffrey Winters. Maka dari itu, Oligarki adalah merupakan suatu perilaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya materil yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya secara eksklusif.

Di Indonesia pembahasan seputar oligarki adalah pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas dan dikupas secara lebih mendalam, dengan

pisau analisis yang begitu baik penulis berharap agar dapat ditemukannya sebuah fakta dan cara baru bagaimana oligarki bekerja di Indonesia, seperti kebanyakan kelompok-kelompok lainnya oligarki juga dapat digolongkan kedalam berapa *cluster*, yaitu:

a) Oligarki Panglima (*warring oligarchy*)

Dalam *cluster* oligarki yang pertama adalah suatu jenis oligarki yang berada di tingkatan teratas, perpecahan antar oligark dapat saja terjadi di tingkatan paling atas sekalipun. Dalam hal ini persekutuan menjadi tidak stabil karena perjanjian diatas kertas yang berubah-ubah. Dalam golongan ini konflik umumnya bersifat lateral antar oligark panglima seperti klaim atas wilayah, sumber kekayaan, sumber daya dan populasi bawahan saling tumpang tindih dan menjadi perseteruan.

b) Oligarki Kolektif

Dalam golongan atau *cluster* ini penguasa secara kolektif muncul dalam bentuk yang lebih ringan seperti halnya senat Yunani-Romawi Kuno. Bangsawan di zaman pertengahan biasanya kerap disebut sebagai oligark yang kolektif.

c) Oligarki Sultanistik

Bentuk Oligarki sultanistik biasanya hadir ketika monopoli sarana pemaksaan berada pada tangan satu individu tertentu. bukan negara yang terlembaga yang dibatasi oleh

hukum, didalamnya terdapat banyak sekali hubungan patron-klien dan tidak adanya penegakan hukum yang terjadi.

d) Oligarki Sipil

Selanjutnya, dalam bentuk oligarki selanjutnya yang merupakan oligarki sipil, sama halnya dengan oligarki sultanistik, oligarki pada jenis ini pun tidak memiliki senjata dan berkuasa secara langsung. Namun perbedaan yang paling signifikan dari jenis oligarki sipil adalah yang menggantikan individu sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan hartanya adalah terdapat lembaga yang dikendalikan oleh hukum.

2.2.3.1 Konsep Dimensi Interaksi Antar Aktor

Dalam menganalisis terkait dengan perumusan suatu kebijakan, perlu bagi penulis untuk memahami siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pembuatan suatu kebijakan tersebut, adapun klasifikasi aktor dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik, yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi. Aktor resmi terdiri dari: 1) Pimpinan Eksekutif. 2) Legislatif, 3) Yudikatif dan 4) Birokrasi. Sementara aktor yang tidak resmi, terdiri dari: 1) Partai Politik, 2) Kelompok Kepentingan dan 3) Masyarakat Sipil.¹⁵

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS: Yogyakarta, 2012, hal. 126.

Klasifikasi tersebut dapat muncul atas dasar aktor-aktor yang terlibat dalam terbentuknya suatu kebijakan publik memiliki satu paradigma atau fondasi untuk menentukan pola maupun distribusi setiap kebijakan dengan proses interaksi sosial yang cukup konflikatif dan bisa dikatakan tidak bersifat harmoni. Dengan demikian, interaksi yang terbangun biasanya berbentuk kerjasama bahkan bisa saja terjadi suatu pertentangan.

Interaksi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam menentukan dan merumuskan setiap kebijakan, terdapat beberapa klasifikasi proses sosial yang timbul akibat dampak dari interaksi yang terjadi, yaitu:

1) Akomodasi, adalah suatu bentuk upaya dalam mencari titik tengah untuk mengakhiri konflik yang terjadi antar kelompok yang satu dan lainnya tanpa adanya kerugian yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat.

2) Kerjasama, suatu bentuk interaksi yang biasanya dijalankan oleh seseorang maupun kelompok sebagai satu konsensus bersama dimana mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama.

3) Asimilasi, merupakan sebuah proses sosial yang terjadi dan biasanya ditandai dengan tujuan mengurangi perbedaan yang terdapat

pada individu maupun kelompok dan juga untuk berupaya menyatukan sebuah sikap dengan memperhatikan kepentingan yang sama.¹⁶

2.3.Kerangka Pemikiran

Gemuknya partai politik koalisi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, membuat eskalasi dinamika politik Indonesia menjadi sangat terkendali bagi pemerintah, namun caru-marut bagi oposisi dan masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial membuat kepala negara harus dapat mengamankan suara rakyat lewat badan legislatif yang merupakan representasi dari rakyat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara proses komunikasi dan konsolidasi yang baik antara Presiden, Partai pengusung dan partai koalisi yang berada dalam lingkaran kekuasaan agar bisa mengamankan pola kekuasaan dengan baik.

Pada pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin besarnya jumlah partai koalisi membuat kekuatan politik di dalam parlemen menjadi tidak berimbang, sekitar 80-20 % perbandingan antara partai pemerintah dan oposisi, itu telah melanggengkan bahwa kekuasaan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan prinsip *check And Balances*. Selain itu pemerintah saat ini juga menguasai segala sektor pada struktur lembaga tinggi negara dari mulai eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang nantinya hal tersebut akan berimplikasi pada hegemoni kekuasaan.

¹⁶ Madani, *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011, hal 50-51.

Secara tidak langsung, hegemoni kekuasaan yang diciptakan membuat peran dari partai oposisi seperti tidak memiliki taring didalam jalannya sebuah pemerintahan, keterasingan didalam parlemen membuat fungsi oposisi dan perannya dipertanyakan para periode kedua Presiden Joko Widodo dan menurut penulis itu berkesinambungan dengan bagaimana pemerintah hari ini telah menghegemoni pemerintahan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana peran beberapa elit partai dalam memainkan peran entah untuk kepentingan koalisi, partai, maupun individu.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

